

## ABSTRAK

EDELLA PIRMA INTANI SARAGIH, DIBAWAH BIMBINGAN DR. HIDAYAT, MSI. KONFLIK ELIT POLITIK TRADISIONAL DAN ELIT MODERN PADA AWAL KEMERDEKAAN DI PURBA KABUPATEN SIMALUNGUN. SKRIPSI S-1 JURUSAN PENDIDIKAN SEJARAH. FAKULTAS ILMU SOSIAL. UNIVERSITAS NEGERI MEDAN .

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, bagaimana latar belakang, proses, dan dampak dari Konflik Elit Politik Tradisional dan Modern di Purba Kabupaten Simalungun. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode heuristik, yaitu dengan mengumpulkan dan menganalisa data secara sistematis dan objektif berdasarkan bukti-bukti dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Kemudian penelitian ini dilakukan dengan dua cara yaitu Penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research). Informannya adalah orang-orang yang dianggap mengetahui informasi dan memiliki kapasitas mengenai masalah yang diteliti. Tehnik pengumpulan data yaitu dengan mengumpulkan, menganalisis, menyimpulkan dan menuangkannya ke dalam tulisan.

Dari penggalian data informasi yang didapat mengenai Konflik Elit Politik Tradisional dan Modern tersebut adalah, bahwa yang melatarbelakangi konflik adalah keinginan dari beberapa kalangan Elit Modern untuk mendapatkan kekuasaan dari hak milik raja dan menghapuskan paham feodal yang dirasa tidak mendukung kemerdekaan Indonesia. Kalangan yang dirasa masih memengang paham ini adalah Kaum Elit Tradisional beserta dengan keluarganya. Proses dari penghapusan tersebut dilakukan oleh orang-orang yang tergabung ke dalam BHL (barisan harimau liar) yang dipimpin oleh Saragih ras. Dan dampak dari pembersihan itu adalah lenyapnya para Kaum Elit Tradisional beserta keluarganya serta hilangnya kerajaan di Simalungun salah satunya adalah Kerajaan Purba dan Raja yang memerintah pada saat itu adalah raja Mogang Purba. Dan mulai saat itu tidak ada lagi Kerajaan di Simalungun.

Setelah berakhirnya kerajaan purba, maka kekayaan kerajaan pun telah berpindah tangan tidak hanya kepada rakyat namun juga kepada kaum elit modern yang mengambil alih pemerintahan di kabupaten simalungun. Dan sisa dari kompleks kerajaan telah diserahkan kepada pemerintah daerah.